

# **ANALISA PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensif  
Sarjana Lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru*



**Oleh:**

**ELVI SUSANTI**  
**NIM: 10573002028**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2010**

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA  
PADA PD. BANK BPR ROKAN HILIR  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI MINOR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Tugas Akademik dan  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru*



**Oleh:**

**SRI HANDAYANI**  
**NIM: 00774000435**

**JURUSAN DIII AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2010**

## **ABSTRAK**

### **ANALISA PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU**

**OLEH  
ELVI SUSANTI**

*Penelitian ini dilakukan pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang kubu telah berjalan secara efektif dan efisien. Adapun kredit yang disalurkan pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang kubu terdiri dari kredit modal kerja umum dan kredit konsumtif.*

*Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan dokumentasi yang dimiliki oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif.*

*Penelitian ini menemukan bahwa meningkatnya jumlah kredit macet secara keseluruhan pada tahun 2005-2008, yaitu tahun 2005 0,17 %, tahun 2006 1,02 %, tahun 2007 2,32 %, dan 2008 3,00 %. Hal ini disebabkan dalam melunasi tagihan kredit para debitur menggunakan hasil dari usaha yang dijalankannya. Setelah kredit dicairkan oleh kreditur pemantauan secara berkala tidak dilakukan oleh pihak bank. Pada struktur organisasi PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang kubu terdapat debt collector, namun dalam melakukan tagihan kredit macet dilakukan oleh debt collector dan analisis kredit. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi rangkap tugas. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang kubu belum berjalan secara efektif dan efisien.*

*Kata Kunci : Pengendalian Intern, kredit*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan .....	14
 <b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Pengendalian Intern.....	16
1. Pengertian Pengendalian Intern .....	16
2. Komponen Pengendalian Intern.....	18
3. Keterbatasan Pengendalian Intern.....	20
B. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat .....	21
C. Kredit.....	24
1. Pengertian Kredit .....	24
2. Unsur-Unsur Kredit.....	25

3. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	26
4. Penentuan Kebijakan Kredit .....	28
5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit .....	29
6. Prosedur Dalam Pemberian Kredit.....	30
7. Pengendalian Intern Kredit .....	32
8. Kredit Macet.....	33
9. Kredit Bermasalah ( <i>Non Performing loan</i> ) .....	34
10. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet .....	34
D. Teori Menurut Islam .....	36

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	38
B. Struktur Organisasi .....	40
C. Aktivitas Perusahaan.....	43

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan Penelitian.....	61
1. Lingkungan Pengendalian.....	61
2. Penaksiran Resiko .....	64
3. Aktivitas Pengendalian.....	65
4. Informasi dan Komunikasi.....	66
5. Pemantauan .....	66
6. Kredit Macet.....	68

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR BIOGRAFI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan jasa usaha perbankan pada saat ini semakin maju sebagai lembaga keuangan yang mempunyai nilai yang strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan ini dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang kekurangan dana. Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perekonomian dan berbagai layanan jasa. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank dalam menjalankan usahanya menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Makin besar jumlah uang yang dipercayakan masyarakat kepada suatu bank, berarti semakin besar pula kepercayaan masyarakat pada bank tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan (2004:31:1) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan atau di pedesaan.

Bank Perkreditan Rakyat melayani masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil seperti melayani masyarakat pedesaan atau masyarakat menengah kebawah. Bank Perkreditan Rakyat dapat menghimpun dana dan menyalurkannya pada masyarakat pedesaan agar masyarakat ekonomi lemah dapat berkembang.

Jenis produk yang ditawarkan oleh BPR relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR seperti pembukaan giro ikut kliring melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan peransuransian.

Kegiatan utama bank adalah menyediakan dana dalam bentuk kredit untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat yang membutuhkan, sehingga unsur pendapatan bunga dari kredit merupakan unsur paling pokok dan dominan agar bank dapat menjalankan usahanya dengan baik, sehingga kelangsungan usaha perbankan dapat terus ditingkatkan dan perekonomian dapat meningkat pula.

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan terdiri dari : keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi personal perusahaan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya pengendalian intern ini akan dapat menciptakan keuntungan dalam suatu usaha. Untuk mencapai keuntungan ini diperlukan syarat-syarat pengendalian intern yang baik. Adapun syarat-syarat pengendalian intern yang baik itu adalah struktur organisasi yang melakukan pemisahan fungsi pertanggungjawaban secara tepat, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memadai yang memberikan pengawasan yang layak terhadap aktiva, hutang, pendapatan dan biaya, praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pelaksanaan dan fungsi tiap-tiap organisasi.



SPAP (2001:319,2) menyatakan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan kepercayaan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait yaitu, lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan dokumentasi, dan pemantauan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Guna menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh debitur dibutuhkan pengendalian intern kredit untuk pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan agar pemberi kredit terkendali dengan baik dan resiko kemacetan kredit dapat diminimalkan.

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Salah satu jenis bank adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khususnya melayani masyarakat kecil dikecamatan atau dipedesaan.

Bank Perkreditan Rakyat melayani masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil seperti melayani masyarakat pedesaan atau masyarakat menengah kebawah. Bank Perkreditan Rakyat dapat menghimpun dana dan menyalurkannya pada masyarakat pedesaan agar masyarakat ekonomi lemah dapat berkembang dan perekonomian pedesaan juga dapat ditingkatkan baik dari segi pertanian maupun perdagangan, dengan cara memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen kepada konsumen.

Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) seperti ikut pembukaan giro dan kliring.

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jasa bank yang dilakukan oleh BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi dengan berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seeluasa bank umum. Keterbatasan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito. Kegiatan selanjutnya adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja umum, kredit perdagangan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Larangan itu meliputi menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan peransuransian.

PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai kegiatan usaha diantaranya menyalurkan kredit dan menghimpun dana dari masyarakat di daerah tersebut. Adapun jenis kredit yang disalurkan oleh PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah :

1. Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain. Jenis kredit modal kerja yang disalurkan kreditnya oleh PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah :

- a. Kredit Pertanian

Kredit pertanian ialah pembiayaan pemeliharaan tanaman menghasilkan dan panen, pengolahan lahan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman sampai panen (untuk tanaman musiman) dan biaya pengolahan di pabrik sampai barang tersebut siap untuk dijual..

- b. Kredit perindustrian

Kredit modal kerja industri merupakan kredit modal kerja yang diberikan pada pengusaha-pengusaha industri yang telah memiliki izin usaha (izin perdagangan dan izin industri). Industri adalah usaha untuk menambah nilai guna sesuatu barang dengan melakukan pengubahan bentuk (*processing*) dari sesuatu atau beberapa bahan menjadi barang jadi atau setengah jadi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit modal kerja perdagangan adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan yang telah memiliki izin usaha perdagangan.

d. Kredit jasa-jasa

Kredit modal kerja jasa-jasa adalah kredit modal kerja usaha-usaha prasarana yang meliputi pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, kontraktor, biro perjalanan, hotel, proyek pasar/*shopping center* ekspedisi muatan kapal laut, real estate.

2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/ perorangan (termasuk karyawan bank mandiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Kredit yang termasuk dalam kredit konsumsi ini adalah kredit kendaraan pribadi, kredit perumahan (untuk dipakai sendiri), kredit untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, dan pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga kredit profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan kredit itu.

Bank indonesia selaku pengawas dan pengatur perbankan di indonesia menetapkan ketentuan umum dalam pemberian kredit melalui analisis 5C, yaitu penilaian terhadap *Charakter* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Colleteral* (agunan), dan *Condition* ( kondisi ekonomi).

Perkembangan jumlah kredit yang telah disalurkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu selama empat tahun kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.1 : PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu****Kredit Yang Disalurkan Periode 2005 – 2008**

Dalam Jutaan Rupiah

No	Jenis Kredit	Tahun 2005 (Baki Debet)	%	Tahun 2006 (Baki Debet)	%	Tahun 2007 (Baki Debet)	%	Tahun 2008 (Baki Debet)	%
1	Kredit Pertanian	Rp 2.165	40,32	Rp 2.951	39,80	Rp 7.184	55,19	Rp 9.713	59,11
2	Kredit Perindustrian	Rp 3	0,06	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-
3	Kredit Perdagangan	Rp 1.861	34,66	Rp 2.222	29,97	Rp 2.720	20,90	Rp 2.785	16,95
4	Kredit Jasa-Jasa	Rp 179	3,33	Rp 895	12,07	Rp 1.290	9,91	Rp 1.308	7,96
5	Kredit Konsumtif	Rp 1.161	21,62	Rp 1.347	18,17	Rp 1.822	14,00	Rp 2.627	15,99
	Total	Rp 5.369		Rp 7.415		Rp 13.016		Rp 16.433	

Sumber: *PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu*

Untuk tahun 2006 sampai tahun 2008 tidak terdapat penyaluran kredit perindustrian, karena menurut hasil wawancara penulis dengan bagian analis kredit mengatakan bahwa tidak ada penyaluran kredit pada kredit perindustrian karena tidak terdapat lagi perusahaan industri di daerah Rokan Hilir.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu mengalami peningkatan cukup besar dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan, dalam hal ini pihak bank tidak terlepas dari resiko kredit bermasalah. Dimana kolektibilitas kredit menurut surat edaran Bank Indonesia nomor:23/12/BPPP ada empat kriteria, kolektibilitas kredit yaitu : a) kredit lancar : adalah tidak terdapat tunggakan pokok, bunga atau cerukan karena penarikan : b) kredit kurang lancar adalah kredit yang terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tapi belum melampaui 30 hari kerja dan terdapat tunggakan bunga c) kredit diragukan adalah kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, dan kredit masih bisa diselamatkan apabila nilai agunan sekurang-kurangnya 75 % dari utang peminjam, d) kredit macet, adalah kredit tersebut tidak termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan kredit tersebut penyelesaiannya tidak diserahkan kepada pengendalian atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan pengajuan ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Untuk lebih jelasnya jumlah kredit bermasalah di PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.2 : PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu**  
**Kolektibilitas Kredit Tahun 2005 - 2008**

Dalam Jutaan Rupiah

No	Kolektibilitas	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
1	Lancar	Rp 4.929	91,79	Rp 6.865	92,58	Rp 11.768	90,42	Rp 14.202	86,41
2	Kurang Lancar	Rp 118	2,20	Rp 193	2,60	Rp 787	6,05	Rp 1.437	8,74
3	Diragukan	Rp 314	5,85	Rp 281	3,79	Rp 158	1,21	Rp 303	1,84
4	Macet	Rp 9	0,17	Rp 76	1,02	Rp 302	2,32	Rp 493	3,00
	Total	Rp 5.370		Rp 7.415		Rp 13.015		Rp 16.435	

Sumber: *PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kredit bermasalah yaitu kredit diragukan dan kredit macet yang disalurkan oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu dalam tahun 2005 sampai 2008 adalah sebagai berikut : tahun 2005 jumlah kredit diragukan sebesar Rp. 314 dengan persentase 5.85 %, kredit macet sebesar Rp. 9 dengan presentase 0,17 %, tahun 2006 jumlah kredit diragukan sebesar Rp 281 dengan persentase 3,79 %, kredit macet sebesar Rp 76 dengan persentase 1,02 %, tahun 2007 jumlah kredit diragukan sebesar Rp 158 dengan presentase 1.21 %, kredit macet sebesar Rp. 302 dengan presentase 2,32 %, tahun 2008 jumlah kredit diragukan sebesar Rp 303 dengan persentase 1,84 %, kredit macet Rp. 493 dengan persentase 3,00 %.

Dari uraian diatas dapat dilihat besarnya kredit macet terus meningkat hingga akhirnya pada tahun 2008 menjadi 3,00 %. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf bank PD BPR Rokan Hilir Cabang Kubu yang paling besar persentase kredit macetnya dari 3,00 % terdapat pada jenis kredit Pertanian. Hal ini bisa dilihat dengan besarnya jumlah pencairan kredit dari tahun ketahun, dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada tahun 2005 sebesar 0.17 %, 2006 sebesar 1.02 %, 2007 2,32 %, 2008 terus meningkat menjadi 3.00 %. Hal ini jelas berdampak buruk bagi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu.



Jenis Kredit yang besar jumlah kredit macetnya itu terdapat pada Kredit Modal Kerja Umum. Hal ini disebabkan karena para debitur dalam melunasi tagihan kreditnya berdasarkan hasil dari usaha yang di jalannya. Seperti Kredit Pertanian atau perkebunan, para debitur melunasi tagihan kredit dengan hasil kebunnya seperti kelapa sawit. Apabila harga kelapa sawit tinggi maka debitur lancar dalam melunasi tagihan kreditnya, namun apabila harga kelapa sawit rendah maka para debitur tidak mampu untuk melunasi tagihan kreditnya sedangkan untuk jenis kredit pertanian juga terdapat peluang yang sangat besar kredit macetnya karena para petani sering mengalami gagal panen, bencana alam, petaninya sakit. Hal inilah yang menyebabkan macetnya kredit.

2. Tidak terdapat pemantauan (*monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit dicairkan, maka bank harus melakukan pemantauan terhadap perusahaan debitur secara berkala minimal per 3 bulan. Jika pemantauan dilakukan terlalu sering banyak biaya yang dikeluarkan, kemudian jika dilakukan untuk kurun waktu yang lama maka informasi yang diperoleh tidak update lagi. Pemantauan yang dilakukan pihak bank adalah tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur. Hal ini tidak sesuai dengan pemantauan (*monitoring*) yang ditetapkan oleh standar professional akuntan publik tentang komponen pengendaaliaan intern .
3. Tidak terdapat pemisahan tugas antara analis kredit dengan *debt collector*. Analis kredit selain melakukan analisis terhadap permohonan kredit debitur, juga melakukan penagihan pada debitur yang tidak lancar pembayaran kreditnya. Ini jelas bahwa analisis merangkap tugas. Hal ini tidak sesuai dengan aktivitas pengendalian intern yang ditetapkan oleh standar profesional akuntan publik tentang komponen pengendalian intern.

Karena kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan tentunya pihak manajemen bank perlu melakukan pengendalian kredit yang efektif. Sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan. Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan analisis dengan judul **“ANALISA PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HILIR CABANG KUBU”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalahnya adalah : apakah pengendalin intern dalam pemberian kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu telah diterapkan secara efektif dan efisien?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui apakah pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu telah berjalan secara efektif dan efisien

### **2. Manfaat penelitian :**

- a. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang dipraktekkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu.

- b. Sebagai masukan bagi pihak manajemen PD. Bank Perkeriditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu dalam pelaksanaan pengendalian intern terhadap pemberin kredit kepada debiturya.
- c. Dapat menjadi rujukan bagi penelitian lainnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sama pada masa yang akan datang.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu yang beralokasi di Jalan Raya Simpang Pelita Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

###### **a. Data Pimer**

Yaitu data mentah yang diperoleh dalam bentuk yang belum jadi dan masih memerlukan adanya pengolahan yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan staf perusahaan yang berwenang.

###### **b. Data Sekunder**

Yaitu data-data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi, yaitu jenis kredit yang diberikan, kualitas kredit yang disalurkan, prosedur pemberian kredit, formulir permohonan membuka kredit, dan sejarah singkat perusahaan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait. Wawancara ini dilakukan guna mendukung data primer.
- b. Dokumentasi, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari bagian analis kredit di PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu seperti jenis kredit yang diberikan, kualitas kredit yang disalurkan, prosedur pemberian kredit, struktur pemberian kredit, struktur organisasi, formulir permohonan membuka kredit, sejarah singkat perusahaan.

### 4. Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang diteliti, kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan metode diskriptif yaitu menganalisa data dengan menelaah dan membandingkan dengan berbagai teori yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, dan selanjutnya dapat diambil sebuah kesimpulan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan menggunakan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

**BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II : Bab ini berisikan uraian teoritis yang mendukung pembahasan masalah diantaranya adalah pengertian pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, keterbatasan pengendalian intern, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, penentuan kebijaksanaan kredit, kredit macet, kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), penyelesaian dan penyelamatan kredit macet.
- BAB III : Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan kegiatan usaha perusahaan.
- BAB IV : Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan menganalisisnya sebagai bahan perbandingan antara teori dan prakteknya pada perusahaan tersebut.
- BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab dahulu yang kemudian akan diberikan saran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Pengendalian Intern**

##### **1. Pengertian Pengendalian Intern**

Pengendalian intern merupakan suatu yang vital dalam proses manajemen perusahaan, kadang-kadang fungsi ini adalah suatu area aktivitas manajemen yang sering diabaikan dan disalah artikan, pengendalian intern merupakan suatu proses mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan serta menjadi suatu bagian yang tidak dipisahkan dalam suatu perusahaan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (Sukrisno Agoes 2000:53), pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat tercapai.

Pengertian pengendalian intern menurut SPAP (2001:319:2)

Adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2000:57), Pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat tercapai.

Dalam menjalankan perannya yaitu menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, keuangan, system pengawasan intern pada suatu perusahaan sangat mempengaruhi terhadap kelayakan laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern yang terdapat dalam suatu badan atau perusahaan sangat menentukan sekali dalam kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Wibowo (2002:133), ada lima prinsip yang harus dimiliki pengendalian intern yang baik, yaitu :

- a. Pembagian tugas harus jelas (*segnetion of duties*)
- b. Dibentuknya pertanggungjawaban (*estabilishment or responsibility*)
- c. Pengendalian secara fisik, mekanik dan elektronik
- d. Prosedur dokumentasi harus ada (*dokumentation procedure*)
- e. Varifikasi internal yang independent (*independent journal verification*)

Pengendalian tugas akan efektif jika hanya satu orang yang bertanggungjawab atas tugas yang diberikan. Pembentukan pertanggungjawaban meliputi persetujuan atas transaksi.

Prinsip umum yang harus diperhatikan dalam pembagian tugas adalah tanggungjawab yang harus diberikan kepada individu yang berbeda dan tanggungjawab untuk memelihara pencatatan harus terpisah dengan yang menjaga fisiknya aktiva.

Dokumen sebagai bukti transaksi harus memenuhi syarat dalam prosedur dokumen. Ada beberapa prinsip prosedur dalam dokumen yaitu semua dokumen harus diberi nama terlebih dahulu (*prenumbered*) yang tercetak serta semua dokumen harus ada tanda tangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen sebagai bukti pencatatan akuntansi (*jurnal*) disampaikan ke bagian akuntansi untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dicatat tepat waktu.

Guna menciptakan pengendalian yang efektif, perlu dibentuk bagian verifikasi yang bertugas mereview, merekonsiliasi, serta menjaga pengendalian internal agar lebih efektif. Untuk itu verifikasi harus dilakukan secara periodik atau mendadak. Dilakukan oleh karyawan yang independen dan harus ada saran yang disampaikan kepada manajer untuk tindakan koreksi.

## **2. Komponen Pengendalian Intern**

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2001:319), menurut lima komponen utama dari pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian mencakup sebagai berikut:
  - 1) Integritas nilai etika
  - 2) Komitmen terhadap kompetisi
  - 3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
  - 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen
  - 5) Struktur organisasi
  - 6) Pemberian wewenang dan tanggungjawab
  - 7) Kewajiban dan Praktik sumber daya manusia
2. Penaksiran resiko, adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilakukan. Umumnya aktivitas



pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan berikut ini:

- a. Review terhadap kinerja
  - b. Pengolahan informasi
  - c. Pengendalian fisik
  - d. Pemisahan tugas
- 4 Informasi dan komunikasi, pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka
  - 5 Pemantauan, adalah proses yang menentukan kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Menurut Amir Abadi Jusuf (2003:236), prosedur pengendalian intern yang baik itu terdiri dari beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengawasan tugas yang cukup memadai meliputi antara lain:
  - a. Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi
  - b. Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan
  - c. Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pembukuan
  - d. Pemisahan tugas dalam pemrosesan data elektronik.
- 2) Otorisasi yang pantas atau transaksi dan aktivitas
- 3) Dokumen dan catatan yang memadai
- 4) Pengendalian fisik dan aktiva dan pencatatan
- 5) Pengecekan dan indeviden atas pelaksanaannya.

Dalam suatu organisasi perusahaan yang baik, harus ada pemisahan tugas dan tanggung jawab diantara para personil dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Struktur organisasai haruslah bersifat fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian jika ada perbaikan ataupun perubahan-perubahan tanpa harus mengadakan perubahan total. Fungsi dan peranan dari pengawasan intern semakin penting karena mengingat berbagai kelemahan manusia yang ada dan kemungkinan-kemungkinan adanya orang-orang yang berusaha menciptakan cara-cara baru untuk menipu para pimpinan.

Dengan demikian tanpa adanya pengendalian intern maka fungsi tiap-tiap bagian dalam perusahaan menjadi tidak jelas dan sulit mengadakan pengawasan atas jalannya operasi perusahaan, aktiva perusahaan menjadi mudah dicuri dan diselewengkan, sehingga akhirnya perusahaan akan menderita kerugian.

### **3. Keterbatasan Pengendalian Intern**

Keterbatasan pengendalian intern menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:26) dapat disebabkan antara lain :

1. Manajemen mengesampingkan pengendalian intern.  
Pengendalian suatu entitas mungkin dikesampingkan oleh manajemen. Sebagai contoh, seorang manajer tingkat senior dapat meminta seorang karyawan tingkat yang lebih rendah untuk mencatat ayat-ayat jurnal dalam catatan akuntansi yang tidak konsisten dengan substansi transaksi dan melanggar pengendalian entitas. Karyawan tingkat yang lebih rendah tersebut dapat mencatat transaksi meski ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar pengendalian entitas, tanpa ketakutan kehilangan pekerjaan.
2. Kesalahan yang tidak disengaja oleh personil  
Sistem pengendalian hanya efektif apabila personil yang menerapkan dan melaksanakan pengendalian juga efektif. Sebagai contoh, karyawan mungkin salah dalam memahami intruksi atau membuat kesalahan pertimbangan. Karyawan juga mungkin melakukan kesalahan karena ketidak ketelitian pribadi, kebingungan, dan kelelahan.
3. Kolusi  
Efektif pemisahan fungsi terletak pada pelaksanaan individual sendiri atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka atau pelaksanaan pekerjaan seseorang diperiksa oleh orang lain, Sering terdapat resiko bahwa kolusi antara individual akan merusak efektivitas pemisahan fungsi. Contohnya, seorang karyawan yang menerima kas dari pelanggan yang berkolusi dengan karyawan lain yang mencatat penerimaan dalam catatan pelanggan agar mencuri kas dari entitas.

## **B. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat**

Defenisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya tampak pada tugas atau usaha bank tersebut. Ada yang mendefenisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat sedangkan defenisi lainnya mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat yang melayani masyarakat ekonomi kecil dan perkreditan rakyat lebih memfokuskan pada masyarakat menengah kebawah dengan adanya bank perkreditan perekonomian masyarakat diharapkan lebih baik.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, (Kasmir:2003:23), yang dimaksud dengan bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Sebagaimana kita ketahui lapangan usaha Bank Perkreditan Rakyat relatif sempit dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya yang dikategorikan dalam Bank Perkreditan Rakyat juga dibatasi dengan batasan-batasan tugas sebagai berikut:

1. Menerima tabungan/simpanan, penabung dan penyimpan harus diberi buku kartu tabungan/simpanan.
2. Menerima simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka paling lama 3 bulan
3. Tidak diperkenankan dalam lalu lintas giro, karena Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang. Dalam hubungan ini, bank yang bersangkutan dilarang untuk mengeluarkan kwitansi yang berfungsi sebagai cek.
4. Menerima dan memberikan kredit kepada pedagang-pedagang atau penduduk desa. Dalam memberikan kredit tersebut antara lain hal-hal sebagai berikut
  - 1) Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun
  - 2) Dalam perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, tidak diperkenankan adanya klausul yang menerapkan bahwa apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminan dengan sendirinya terjual kepada bank
  - 3) Didalam menentukan suku bunga hendaknya berpedoman kepada suku bunga yang berlaku, sedangkan untuk biaya administrasi, provisi dan lain-lain tidak boleh melebihi 2,5 % dan di pungut hanya sekali saja yaitu pada saat pemberian kredit.

4) Tidak memperkenankan menetapkan jangka waktu kredit cicilan kredit kurang dari satu minggu (walaupun jangka waktu kredit tersebut mungkin lebih dari 1 bulan). Sungguhpun demikian, apabila debitur sendiri, karena kebutuhan usahanya ingin melakukan cicilan secara harian, maka bank dapat memberikan kesempatan tersebut kepada debitur yang bersangkutan

5 Tidak diperkenankan melakukan praktek pegadaian.

Artinya disini kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi kegiatan menghimpun dana saja, bahkan dalam penghimpunan dana Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk menerima simpanan giro, begitu juga dalam jangkauan wilayah operasi Bank Perkreditan Rakyat hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah yang tertentu saja.

Selanjutnya pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan modal yang relatif kecil jika dibandingkan dengan modal awal bank umum, membuat Bank Perkreditan Rakyat jadi kurang berkembang, serta larangan lainnya bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah tidak diperkenankan ikut dalam transaksi valuta asing.

Adapun tujuan didirikan Bank Perkreditan Rakyat menurut Juli Irmayanto,dkk. (2000:84) adalah:

1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan
2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan pedagang kecil didesa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang.

3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana sebab mungkin yang dilayani adalah orang-orang yang relatif rendah pendidikannya
4. Menghimpun dan menampung tabungan masyarakat, dengan demikian Bank Perkreditan Rakyat dituntut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung, dengan menyediakan tempat terdekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

Bank Perkreditan Rakyat memiliki usaha pokok menghimpun dana dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Hal ini justru menimbulkan kesan seolah-olah bank bekerja diatas modal milik orang lain, yang kemudian dipinjamkan kepada masyarakat yang memerlukan. Fungsinya untuk mencari dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank.

Agar bank lebih baik dalam melaksanakan operasinya maka bank dituntut untuk dapat lebih banyak menarik dana dari masyarakat, karena dari masyarakat merupakan inti kesuksesan agar dapat dikelola untuk memperoleh keuntungan.

## **C. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukanlah merupakan kata yang asing dalam masyarakat kita. Menurut Veithzal Rivai, dkk. (2007:438),

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan Sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerja dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *credium*, meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa credit berasal dari *credere*.

Dan beberapa pengertian kredit menurut Veithzal Rivai, dkk. (2007:438)

antara lain :

(1) Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak; (2) kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil; (3) penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari; (4) suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu; serta (5) suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.

Sedangkan menurut Hadiwijaya dan Rivai Wirasasmita (2001:6) yang mengemukakan pengertian Kredit adalah suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang.

Menurut Lukman Dendawijaya (2002:82), Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditanggguhkan pada jangka waktu yang disepakati.

## **2. Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2003:94), adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituang dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut ia berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin panjang resikonya, demikian sebaliknya . resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lain.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berprinsipkan syariah balas jasanya ditentukan dalam bagi hasil.

### 3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Thomas Suyatno, H.A. Chalik, dkk (2007:14), berpendapat bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak lepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain :

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima



oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- 2) Membuka kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- 4) Menghemat devisa Negara
- 5) Meningkatkan devisa negara

Kemudian disamping tujuan diatas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang  
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.  
Dalam hal ini uang yang diberikan akan disalurkan, akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang  
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran barang  
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar bertambah. Atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar

- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi  
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
  - f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha  
Bagi sipenerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
  - g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan  
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut pasti membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.
  - h. Untuk meningkatkan hubungan internasional  
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.
- Menurut Suhardjono (2003:161) tujuan pemberian kredit sebagai berikut :
- a) Turut mensukseskan program perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
  - b) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya
  - c) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat

#### **4. Penentuan Kebijakan Kredit**

Bank sebagai lembaga kredit harus menentukan kebijakan-kebijakan kredit yaitu suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun secara lisan.

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2001:24), bahwa dalam menetapkan kebijakan kredit harus diperhatikan tiga azas pokok yaitu:

1. Azas likuiditas, yaitu suatu azas yang mengharuskan bank untuk tetap menjaga tingkat likuiditasnya.
2. Azas solvabilitas, yaitu usaha pokok perbankan adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.
3. Azas Rentabilitas, seperti halnya pada setiap usaha akan selalu mengharapkan untuk mendapatkan laba.

## 5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut akan diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C.

Adapun penjelasan untuk analisis 5 C kredit menurut Warman Djohan (2000:106), adalah sebagai berikut

- a. *Character*  
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, hobi dan sosial standingnya. Ini merupakan ukuran “kemauan” membayar.
- b. *Capacity*  
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini, pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. *Capital*  
Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali, untuk itu perlu dilihat laporan keuangan perusahaan (neraca/rugi laba)
- d. *Collateral*  
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

## 6. Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2003:110) adalah sebagai berikut :

### 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dilampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh bank. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:

- Perusahaan  
Nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- Maksud dan tujuan  
Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan produk baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- Besarnya kredit dan jangka waktu  
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnyan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan 3 tahun terakhir.
- Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengendalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

- Jaminan kredit.  
Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:
  - Akte notaris  
Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk P.T atau Yayasan.
  - T.D.P ( Tanda Daftar Perusahaan)  
Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan perdagangan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
  - N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak) nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWPnya.
  - Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
  - Bukti diri dari pimpinan perusahaan
  - Foto copy sertifikat jaminan
2. Penyelidikan berkas pinjaman  
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit tersebut dibatalkan saja.
  3. Wawancara  
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
  4. *On the spot*  
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
  5. Wawancara tahap II  
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Jika diterima maka disiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya di kirim surat penolakan dengan alasannya masing-masing.

7. Penanda tangan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu melalui sekaligus atau secara bertahap.

Penerapan prosedur pemberian kredit yang sehat menurut Suhardjono

(2003:122), adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana pemasaran tahunan
- b) Pemberian putusan kredit sesuai ketentuan
- c) Penyusunan perjanjian kredit
- d) Dokumentasi dan administrasi kredit
- e) Persetujuan pencairan kredit
- f) Pembinaan dan pengawasan

## 7. Pengendalian Intern Kredit

Pudjo mulyono (2001:24), pengendalian kredit didefinisikan sebagai berikut:

“Pengendalian kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kelayakan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna

menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar”.

Pengendalian intern kredit sebaiknya dimulai dari proses pemberian kredit apakah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan atau tidak, karena penyimpangan dalam prosedur kredit akan memberikan resiko yang tinggi dan kredit bermasalah akan bertambah besar.

Menurut Veithzal Rivai, dkk. (2007:509), ada beberapa struktur pengawasan pengendalian yaitu:

1. Pengendalian Intern

Pengawasan yang baik harus memiliki kemampuan. Dalam arti andal dan dapat menjamin bahwa dalam penyaluran perkreditan dapat dicegah penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat. Penerapan pengendalian intern dibidang perkreditan meliputi berbagai hal berikut.

2. *Division of Duties*

- 1) *Division of duties* artinya adanya pemisahan tugas antara fungsi-fungsi administratif, operasional, fungsi penyimpanan, dan dapat juga berupa pembagian tugas dan wewenang berdasarkan tingkat jabatan yang ada. Pemisahan fungsi, tugas dan wewenang dimaksudkan agar tercapai internal check secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada. Selanjutnya dengan penerapan internal check yang baik melalui pemisahan fungsi, wewenang, dan tugas yang jelas, tidak akan terjadi seseorang melaksanakan pekerjaan dari awal sampai selesai tanpa adanya kontrol.

- 2) *Division of duties* merupakan salah satu unsur *internal control* yang harus selalu dievaluasi sehingga apabila ditemukan pembagian tugas yang tidak memadai/tidak tepat, dapat segera disusun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh manajemen untuk memperoleh pembagian tugas yang efektif.

## 8. Kredit Macet

Bagaimana sehatnya kebijaksanaan kredit dan betapapun sistematisnya analisa terhadap semua permohonan kredit, namun ada beberapa kredit yang macet pengembaliannya.

Menurut Gatot Supratmono (2000:22), yang dikatakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu lagi membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.

### **9. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)**

Menurut Vaithzal Rivai, dan Andria Permata (2006:770) Kredit bermasalah dimaksud adalah suatu kondisi kredit, dimana ada suatu penyimpangan (*deviasi*) atas *term of lending*, yang disepakati dalam pembayaran kembali kredit itu sehingga terjadi keterlambatan atau diperlukan tindakan yuridis atau diduga ada kemungkinan *potensial loss*.

### **10. Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Macet**

Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit diragukan dan macet. Jika bank telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan, tentu saja tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur.

Menurut Kasmir (2002:115), tindakan yang dapat diambil untuk penyelamatan kredit macet adalah sebagai berikut.

#### *1. Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang diberikan adalah :

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan , kemudian menjadi 6 bulan.
- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

#### *2. Reconditioning*

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain:



- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.
- b. Penundaan pembayar bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini di tempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- d. Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (break even). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.
- e. Pengkorvesian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

### 3. *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal. Tindakan yang tepat diambil dalam rangka restructuring adalah :

- a. Tambahan kredit.  
Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.
- b. Tambahn *equity*  
Apabila tambahan modal memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunga, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa:
  - a) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara:
    - Penambahan/penyetoran uang
    - Konversi uang nasabah, baik uang bunga, uang pokok, atau keduanya.
  - b) Tambahan dari pemilik.  
Kalau perusahaannya adalah P.T, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham.

### 4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

### 5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya..

#### D. Teori Menurut Islam

Dalam Al-Quran surat Al- Baqarah (2) : 282 Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَضَيْتُمْ مَدِينًا إِلَىٰ آخِيٍّ أَوْ إِلَىٰ آخِيٍّ فَتَكْتُمُوا  
وَلْيَكْتُم بِمِثْلِهِ نَكَاحًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِ نَكَاحًا أَنْ يَكْتُمَ عَمَّا ظَنَّه  
اللَّهُ عَلَيْهِ كُتْمًا وَالْعَدْلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِظَنِّ اللَّهِ رِجَالَهُ وَلَا يَكْتُم  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ شَبِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَنْ يَدُلَّ عَلَىٰ ظَنِّهِ فَيَدْعُو لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَأَعْلَنُوا فَيَسْجِدْ لَهُ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ  
فَإِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَإِنَّ كُفْرَكُمْ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ يُكْفِرْ فَإِنَّ اللَّهَ فَاعِلُ  
تَكْفُرِهِ إِذْ أَخَذْتُمْهُمَا فَعَدَّ غَيْرَ أَخَذْتُمَا الْآخِرَ وَلَا يَأْتِ الْفَهْمَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا ضَعِيفًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِيٍّ فَإِنَّكُمْ أَقْسَطُ جِدَدِ  
الَّذِينَ آتَوْكُمْ بِالْبُيُوتِ وَأَدْنَىٰ آلَا فَرَامُوا إِلَّا أَنْ كُنْتُمْ يَجْعَلُونَ عَامِلًا  
فِيهِمْ وَقَدْ تَكْتُمُ قَلْبُكُمْ عَلَيْهِمْ سَتَآتُونَ عَنْ بَعْضِهِمْ خَافَتُمْ إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُغْنَاكُمْ نَكَاحًا وَلَا هُوَ إِلَّا قَسْوَمَةٌ فَإِنْ تَمَتَّلُوا فَاقْتَدُوا لِمَنْ شِئْتُمْ  
وَأَقْبُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>[179]</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

*(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dari firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282 di atas, menerangkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dengan tidak secara tunai (kredit), maka Islam mensyari'atkan kepada pelakunya untuk mencatat. Dalam pencatatan tersebut harus disertai atau menghadirkan dua orang saksi yang adil dari kalangan laki-laki. Jika dua orang laki-laki tidak ada, boleh meminta kesaksian kepada satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Perlunya dua orang saksi karena bisa jadi satu orang saksi terlupa, maka saksi yang kedua bisa mengingatkannya. Perintah mencatat merupakan sebuah syari'at yang diwajibkan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan transaksi secara kredit enggan untuk mencatatnya, maka hal ini merupakan suatu pelanggaran atau perilaku yang tidak disenangi oleh Allah SWT.

Hal ini berbeda dengan transaksi yang dilakukan secara tunai, tidaklah merupakan suatu tindakan pelanggaran. Karena di dalam transaksi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Di sisi lain, perlunya mencatat dalam transaksi yang dilakukan secara kredit karena Islam ingin menghindari terjadinya praktek penzhaliman kepada dua orang yang sedang melakukan praktek perekonomian (transaksi).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

Bank PD.BPR Kubu merupakan singkatan dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kubu yang berasal dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kubu. BKK Kubu berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. KPTS. 669./XI /1996 tanggal 20 November 1986. Pengukuhan BKK Kubu menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kubu Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 21 Tahun 1996, Surat Bank Indonesia No. 30/98/DIR/UBPR/Rahasia tanggal 12 Januari 1998 dalam pertimbangannya, bahwa PD BPR Kubu telah memenuhi syarat untuk mendapat izin usaha sebagai BPR.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan surat permohonan izin usaha dalam rangka pengukuhan menjadi BPR dari pimpinan BKK Kubu No. 017/BKK-KUBU /1997 dan No. 21/BKK-KB/1997 masing-masing tanggal 11 Oktober 1997 dan 8 Desember 1997 yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis, maka menteri keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. KEP.066/KM.17/1998 tanggal 18 Februari 1998, telah memutuskan untuk memberikan izin usaha sebagai BPR kepada PD. BPR Kubu Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, dengan tempat kedudukan di Kecamatan Kubu. Ketetapan pemberian izin dimaksud berlaku sejak tanggal 18 Februari 1998.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis, yang pembentukan berdasarkan UU No. 53 tahun 1999. Dengan telah terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir, maka diadakan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Bengkalis denhan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Nota Kesepakatan No. 180/HK/2003 dan 06/HK/2003 tanggal 22 Agustus 2003 tentang penyerahan Asset dan kepemilikan PD. BPR Kubu dari pemerintah kabupaten Bengkalis kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Nota Kesepakatan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rokan Hilir sesuai dengan surat No. 191/DPRD-RH/IX/2003. Selanjutnya Bupati Rokan Hilir mengeluarkan Keputusan Bupati No. 500/EKBANG/2003/303 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Penetapan Kepemilikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kubu menjadi milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bank Indonesia dengan surat No. 5/133/DPBPR/IDBPR/Pbr tanggal 6 November 2003 tentang kepemilikan PD. BPR Kubu, telah memberikan persetujuan tentang penyerahan asset dan kepemilikan dimaksud.

Sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia diatas, maka perlu dilengkapi persyaratan pengalihan kepemilikan dan asset tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Guna memenuhi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud nama PD. BPR Kubu berubah menjadi Bank BPR Rokan Hilir. Namun perubahan tersebut belum

mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dikarenakan Perda tersebut perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu :

### **1. Pimpinan Cabang**

Tugas pokok:

- a. Menjamin Kualitas pelayanan nasabah dan kualitas sumber daya manusia di cabang.
- b. Menciptakan, memastikan dan meningkatkan keuntungan usaha cabang.
- c. Menjamin kualitas pengawasan intern sesuai dengan petunjuk pengawasan yang telah ditentukan
- d. Mengkoordinasi pembuatan rencana kerja, anggaran cabang dan melakukan evaluasi serta memenuhi target yang telah ditentukan.
- e. Mewakili Bank PD. BPR dalam semua kegiatan resmi diwilayah kerjanya.
- f. Menjamin kualitas dan pertumbuhan usaha cabang baik dalaam asset, laba, kredit serta dana pihak ketiga.
- g. Menjamin peningkatan pendapat dan pengambilan biaya.
- h. Melakukan penjualan (pemasaran) di cabang.
- i. Melakukan otorisasi transaksi operasional yang melampaui kewenangan bawahannya.

- j. Menjamin produktivitas, kemampuan, motivasi, dan disiplin pegawai yang tinggi.

## 2. Seksi Dana

Tugas pokok seksi dana adalah pengendalian dan mengatur kegiatan tentang pendanaan, yaitu uang keluar maupun uang masuk.

### a. Pelaksanaan Pelayanan dan Informasi Nasabah (CS)

Tugas pokok dari pelaksanaan dan Pelayanan Informasi Nasabah adalah memberikan pelayanan kepada nasabah secara langsung selain itu juga memberikan pelayanan dengan menerima informasi saldo serta menerima komplek dari nasabah.

### b. Pelaksanaan Tabungan dan Deposito

Tugas pokok pelaksanaan Tabungan dan Deposito adalah menerima permohonan dari nasabah untuk membuka tabungan baru dan membuat tabungan deposito.

### c. Pelaksanaan Teller

Tugas pokok dari teller adalah memberi pelayanan kepada nasabah dengan menerima pemindahan bukuan, penukaran uang, setoran untuk tabungan, deposito dan giro.

## 3. Seksi Kredit

Tugas pokok Seksi Kredit adalah memastikan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan bagi nasabah dengan kualitas pelayanan yang memberikan permohonan sampai akad kredit dan memastikan semua prosedur berjalan dengan benar.

### a. Pelaksanaan Pelayanan Kredit

Tugas pokok pelayanan kredit adalah memberikan informasi tentang permohonan kredit dan menerima permohonan kredit dari calon nasabah.

b. Pelaksanaan Analisa Kredit

Tugas pokok pelaksanaan analisa kredit adalah menilai dan menginvestigasi atas agunan kredit serta melakukan transaksi, dan membuat anggaran laporan atas agunan kredit tersebut.

c. Pelaksanaan ADM. Kredit

Tugas pokok Administrasi kredit adalah mengurus urusan-urusan yang berhubungan dengan kredit dari para nasabah.

d. Pelaksanaan Penagihan Kredit

Tugas pokok pelaksanaan penagihan kredit adalah memberi informasi atas tunggakan kredit bulanan kepada nasabah.

4. Seksi Operasional

Tugas pokok seksi operasional adalah merencanakan, mengkoordinasi, mendelegasikan, mengontrol semua aktivitas bidang operasional cabang demi tercapainya target bidang pelayanan operasional yang efisien dan efektif sehingga terwujud pertumbuhan asset dan keuntungan yang tinggi. Mengelola operasional harian, menjamin standar kualitas yang tinggi dibidang pemrosesan Transaksi Administrasi Kredit dan administrasi cabang.

a. Pelaksanaan ADM. Umum dan Rumah Tangga



Tugas pokok pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga adalah mengerjakan semua surat-surat yang dibutuhkan oleh Bank PD. BPR tersebut dan penyimpanan file Bank PD. BPR, tentang administrasi umum

b. Pelaksanaan Pembukuan atau Pelaporan

Tugas pokok bagian pembukuan adalah membuat laporan keuangan Bank PD. BPR di setiap transaksi terjadi dan membuat laporan keuangan akhir tahun.

5. Kantor Kas

Tugas pokok dari kantor kas adalah menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh *teller* dan *servis asisten*, karena keduanya itu berada di dalam kantor kas.

### C. Aktivitas Perusahaan

Sebagai mana tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998, bahwa maksud dan tujuannya didirikan BPR untuk membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan, pembangunan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan taraf hidup rakyat.

Adapun kegiatan usaha Bank BPR Kubu diantaranya sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit

3. Menempatkan dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada Bank lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Kredit yang disalurkan di PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu terbagi dalam dua jenis yaitu:

##### **1. Kredit modal kerja umum**

Kredit modal kerja umum yaitu kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain. Jenis kredit modal kerja yang disalurkan kreditnya oleh PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah :

##### **a. Kredit Pertanian**

Kredit pertanian ialah pembiayaan pemeliharaan tanaman menghasilkan dan panen, pengolahan lahan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman sampai panen (untuk tanaman musiman) dan biaya pengolahan di pabrik sampai barang tersebut siap untuk dijual..

##### **b. Kredit perindustrian**

Kredit modal kerja industri merupakan kredit modal kerja yang diberikan pada pengusaha-pengusaha industri yang telah memiliki izin usaha (izin perdagangan dan izin industri). Industri adalah usaha untuk menambah nilai guna sesuatu barang dengan melakukan pengubahan bentuk (*processing*) dari sesuatu atau beberapa bahan menjadi barang jadi atau setengah jadi.

### c. Kredit Perdagangan

Kredit modal kerja perdagangan adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan yang telah memiliki izin usaha perdagangan.

### d. Kredit jasa-jasa

Kredit modal kerja jasa-jasa adalah kredit modal kerja usaha-usaha prasarana yang meliputi pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, kontraktor, biro perjalanan, hotel, proyek pasar/*shopping center* ekspedisi muatan kapal laut, real estate.

## 2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank mandiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Kredit yang termasuk dalam kredit konsumsi ini adalah kredit kendaraan pribadi, kredit perumahan (untuk dipakai sendiri). kredit untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, dan pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga kredit profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan kredit itu.

Sebelum kredit disalurkan terlebih dahulu di lakukan pembahasan yang lazim disebut dengan analisa kredit. Analisa kredit ini bertujuan untuk menganalisa persyaratan-persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur serta nilai kelayakannya, selain itu analisa ini berguna pula untuk mencapai sasaran yang diinginkan bank, agar terhindar dari resiko krdit, serta dapat pula mengenakan sasaran pemberian kredit kepada debitur yang benar-benar membutuhkan.

Secara umum prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan permohonan kredit

Permohonan kredit calon debitur diterima oleh bagian kredit, permohonan tersebut diseleksi untuk di analisa.

2. Peninjauan usaha dan jaminan calon debitur

Pada PD. BPR Rokan hilir Cabang Kubu peninjauan usaha dan jaminan calon debitur dilakukan oleh bagian kredit yang disebut dengan *account officer*

3. Proses analisa secara tertulis tentang usaha calon debitur

Proses analisa secara tertulis dilakukan oleh bagian kredit yang disebut dengan komite kredit. Yang termasuk dalam analisa kredit secara tertulis mencakup analisis 5 C.

4. Dilakukan musyawarah oleh bagian-bagian yang berwenang dalam pemberian kredit

Dalam hal ini bagian-bagian yang berwenang dalam pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu yaitu Pimpinan cabang dan direksi.

5. Persetujuan dan pencairan kredit

Setelah permohonan kredit calon debitur dianalisa sesuai dengan prosedur, apabila permohonan tersebut layak untuk diterima maka permohonan tersebut harus meminta persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam menyetujui permohonan kredit ini berbeda-beda tergantung dari jumlah plafon kreditnya. Apabila jumlah plafon kredit tiga puluh juta kebawah maka yang menyetujui adalah pimpinan cabang, sedangkan jumlah plafon tiga puluh

juta keatas maka yang berhak menyetujui permohonan kredit adalah direksi. Setelah permohonan disetujui selanjutnya kredit dicairkan.

Untuk menghindari resiko kredit dalam pengambilan keputusan maka pada penelitian ini akan dijelaskan prosedur apa yang akan dijalankan yang telah ditetapkan oleh direksi. Tahap pengajuan permohonan kredit untuk jenis kredit modal kerja umum, kredit jasa-jasa umum dan konsumtif memiliki prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Tahap pertama debitur mendatangi bank untuk mendapatkan informasi kemungkinan mendapatkan kredit. Petugas bank memberikan penjelasan seperlunya dan menyerahkan blanko permohonan kredit kepada calon kreditur untuk diisi dengan melampirkan persyaratan berikut ini:
  - 1) Photocopy KTP suami/istri
  - 2) Pas photo 4X6 masing-masing 1 lembar (pemohon dan ahli waris)
  - 3) Photocopy kartu keluarga 1 lembar
  - 4) Jaminan kredit
2. Tahap kedua bagian umum meneliti kelengkapan formulir permohonan yang telah diisi lengkap oleh calon debitur, permohonan dicatat kedalam buku register dan dicap serta diberi tanggal sebagai tanda terima sebelum diserahkan pada bagian kredit.
3. Tahap ketiga bagian administrasi meneliti apakah calon debitur termasuk dalam daftar hitam dan melakukan kunjungan kelokasi. Bagi kredit konsumtif cukup didatangi rumahnya dan menganalisa hubungan dengan lingkungannya. Dari kunjungan ini maka bagian administrasi menganalisa serta menyimpulkan prospek usaha debitur apakah layak atau

tidaknya debitur tersebut diberi kredit, jika layak maka bagian administrasi membuat perencanaan kredit kemudian diserahkan kepada direktur utama untuk dimintai persetujuan.

4. Tahap empat adalah persetujuan, Direktur utama memberikan persetujuan kredit, bila diperlukan pembahasan lebih lanjut dilakukan melalui rapat dewan komisaris.
5. Tahap kelima adalah tahap legalisasi, lalu draf perjanjian dan akte pengikat jaminan disiapkan oleh bagian administrasi, kemudian penandatanganan surat perjanjian kredit dan pengikat jaminan dilakukan.
6. Tahap yang terakhir adalah realisasi dana setelah semua tahap diatas dilalui. Kemudian bagian umum memeriksa kelengkapan realisasi kredit dan membuat advis kredit untuk permintaan dana. Selanjutnya kredit direalisasikan, dan debitur bisa mengambil di teller.

Kredit diberikan kepada debitur yang mana pihak bank dalam hal ini membutuhkan jaminan dalam bentuk fisik. Pemberian kredit ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan kepercayaan petugas pengelola yang seksama terhadap calon debitur, serta kelayakan usaha yang dijalankan oleh calon debitur.

Adapun persyaratan calon debitur yang dapat dibantu dalam pengambilan kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Harus mempunyai usaha yang akan dibiayai
- 2) Usahnya cukup layak pada daerah setempat
- 3) Mempunyai prospek perkembangan usaha yang baik
- 4) Debitur tersebut diwajibkan menjadi penabung pada bank

- 5) Usaha tersebut harus dikelola langsung oleh calon debitur
- 6) Diakui sebagai penduduk wilayah kerja bank tersebut (harus mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dan lain-lain).

Prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu adalah sebagai berikut:

- a. Calon debitur mengajukan usulan kredit kebagian bidang umum dengan mengisi formulir permohonan kredit dan melampirkan: foto copy kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, fotocopy atas kepemilikan barang yang akan dijadikan agunan atau jaminan serta pas photo dua lembar.
- b. Bidang umum melakukan seleksi setiap permohonan kredit dan menganalisa data-data permohonan kredit dan melakukan survey terhadap usaha dan cek fisik terhadap jaminan.
- c. Bidang administrasi meneruskan untuk meminta persetujuan pada direktur namun bidang administrasi dapat juga menolak atas permohonan kredit dan calon debitur bila dianggap tidak layak.
- d. Jika kredit telah disetujui oleh direktur maka bagian pembukuan menyiapkan perjanjian kredit.
- e. Kemudian pengambilan kredit serta pelunasannya dapat dilakukan pada teller

Bagian-bagian yang terlibat dalam pemberian kredit meliputi: Bidang umum, bidang administrasi, direktur, bagian pembukuan, teller.

Bidang umum berfungsi melakukan seleksi setiap permohonan kredit dan menganalisa data-data permohonan kredit dan melakukan survey terhadap usaha



dan cek fisik terhadap jaminan. Bidang administrasi berfungsi meneruskan untuk meminta persetujuan pada direksi namun bidang administrasi dapat juga menolak atas permohonan kredit dan calon debitur bila dianggap tidak layak. Direktorat berfungsi untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit. Bagian pembukuan mempunyai tugas pokok membuat laporan keuangan Bank PD. BPr Rokan Hilir Cabang Kubu disetiap transaksi terjadi dan membuat laporan keuangan akhir tahu. Teller mempunyai tugas pokok memberi pelayanan kepada nasabah dengan menerima pemindah bukuan, penukaran uang, setoran untuk tabungan, deposito, serta tempat pengambilan kredit dan pelunasannya.

Setiap debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari pihak bank harus dapat mengembalikan kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pelunasan kredit ini bahwa debitur telah memenuhi semua kewajibannya terhadap pihak bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Dalam pelunasan kredit terdapat beberapa tahapan yang dilakukan pihak bank. Adapun tahap pelunasan kredit adalah sebagai berikut:

- a) PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu akan memperhitungkan semua kewajiban hutang debitur yang harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasannya yang meliputi hutang pokok, hutang bunga, jika ada denda-denda, biaya asuransi barang jaminan dan biaya administrasi yang menunggak.
- b) PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu akan mengadakan inventarisasi atas dokmen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan pada jaminan yang tersedia.

- c) Bila semua kewajiban kredit telah dilunasi oleh debitur, maka pihak bank akan menyerahkan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada debitur yang disertai surat tanda terima. Pengembalian dokumen oleh bagian kredit dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin pimpinan cabang.
- d) Setelah semua hutang dilunasi oleh debitur, maka pihak bank khususnya bagian kas menutup rekening atas nama debitur yang bersangkutan.
- e) Pihak bank akan membuat surat penegasan pelunasan kredit yang antara lain berisikan pernyataan terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara debitur dengan pihak bank pada masa yang lalu.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa kredit menanggung resiko yaitu kerugian akibat tidak tertagihnya kembali dana yang telah disalurkan. Suatu kredit digolongkan macet apabila:

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan.
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan atas usaha penyelamatan kredit, atau
3. Kredit tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) .

Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

- 1) Memberikan keringanan bunga
- 2) Merubah atau memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit
- 3) Memperpanjang jangka waktu kredit
- 4) Memperbaiki pinjaman

Dalam hal ini pejabat bank turun ke lapangan untuk melaksanakan pemeriksaan kegiatan usaha debitur, apakah usaha debitur tersebut perlu ditambah atau tidak modalnya.

- 5) Menjual agunan atau jaminan
- 6) Diselesaikan secara hukum.

Jika ada debitur yang tidak mau melunasi kreditnya, maka pihak bank akan menempuh jalur hukum dengan menyerahkan masalah penagihan ke Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau pengadilan negeri.

Bila kredit tersebut tidak ada lagi harapan untuk diselamatkan kembali, maka pihak bank terpaksa menghapus kredit tersebut dan kredit macet tersebut dianggap sebagai kerugian. Alasan yang mendasari dihapuskannya kredit dalam pencatatan adalah karena jaminan kredit sudah tidak ada, walaupun ada tidak mencukupi untuk melunasi kredit, debitur meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.

Proses penghapusan kredit macet pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penghapus bukuan kredit

Kredit yang macet tersebut tidak terdaftar lagi di dalam sistem, tetapi pihak bank masih melakukan penagihan terhadap debitur.

## 2. Penghapusan buku tagihan

Kredit yang macet tersebut tidak terdaftar lagi di dalam sistem dan pihak bank tidak melakukan penagihan. Tetapi pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu walaupun kredit macet sudah dihapus buku tagihan pihak bank tetap melakukan tagihan pada debitur yang bersangkutan.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu untuk melihat bagaimana kredit itu dikatakan macet dapat dilihat dari besarnya tunggakan pembayaran kredit yang dikelompokkan sebagai berikut :

### a. Kredit Lancar

Suatu kredit dikatakan lancar apabila :

1. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, bunga ataupun cerukan karena penarikan.
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi
  - a) Belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan
  - b) Belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya 2 bulan atau 3 bulan, atau
  - c) Belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih.
3. Terdapat tunggakan bunga tetapi :

- a) Belum melampaui 1 bulan kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
  - b) Belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1
4. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya melampaui 15 hari kerja.

b. Kredit Kurang Lancar

Kredit dikatakan kurang lancar apabila :

- 1. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit yang masa angsuran kurang dari 1 bulan.
- 2. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan.
- 3. Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih, atau
- 4. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau
- 5. Terdapat tunggakan bunga yang :
  - a. Melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan, atau
  - b. Melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

c. Kredit Diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti tersebut diatas, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kredit masih bisa diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang debitur termasuk bunga, atau
2. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari pinjaman.

d. Kredit Macet

Suatu kredit digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti tersebut diatas.
2. Memenuhi kriteria diragukan diatas tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
3. Kredit tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan pengajuan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang kubu dilakukan langkah-langkah sbagai berikut :

1. *Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang diberikan adalah :

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan , kemudian menjadi 6 bulan.
- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

## 2. *Reconditioning*

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.
- b. Penundaan pembayar bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini di tempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.

- d. Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (break even). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.
- e. Pengkorvesian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

### 3. *Restructuring*

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal. Tindakan yang tepat diambil dalam rangka restructuring adalah :

#### a. Tambahan kredit.

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

#### b. Tambahn *equity*

Apabila tambahan modal memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunga, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa:

##### a) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara:

- Penambahan/penyetoran uang



- Konversi uang nasabah, baik uang bunga, uang pokok, atau keduanya.

b) Tambahan dari pemilik.

Kalau perusahaannya adalah P.T, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham.

#### 4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

#### 5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya..

Berdasarkan penelitian terhadap pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Rokan Hilir Cabang Kubu, maka ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan pengendalian intern yang ditetapkan oleh SPAP,

Besarnya jumlah kredit bermasalah (Non Performing Loan) terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu tahun 2005 0,17 %, tahun 2006 1,02 %, tahun 2007 2,32 %, dan tahun 2008 menjadi 3,00 %. Hal ini disebabkan para debitur dalam melunasi tagihan kreditnya tergantung pada hasil penjual usahanya.

Tidak terdapat pemantauan (*monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit dicairkan. Pemantauan yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank adalah tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman debitur.

Pada struktur organisasi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu ada terdapat *debt collector* tapi dalam melakukan penagihan kredit yang macet pembayarannya dilakukan oleh *debt collector* dan analis kredit. Ini jelas

pemisahan tugas terhadap lingkungan pengendalian belum sepenuhnya dilakukan karena bagian kredit masih merangkap tugas.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Lingkungan Pengendalian,**

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian mencakup berikut ini:

#### **1) Integritas dan nilai etika**

Meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensif dan godaan yang menyebabkan karyawan bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis.

Pada PD.BPR Rokan Hilir Cabang kubu bagi karyawan yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas. Seperti karyawan yang datang terlambat 3 kali dalam satu bulan maka karyawan tersebut diberi sanksi berupa tidak diberikan bonus untuk bulan yang bersangkutan.

#### **2) Komitmen terhadap kompetensi**

Meliputi perkembangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut menjadi keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu bagi manajemen yang kompeten dinaikkan jabatannya, sedangkan bagi manajemen yang

tidak kompeten diberi pelatihan atau training. Training diberikan kepada manajemen untuk meningkatkan kompetensi bagi manajemen.

### 3) Partisipasi dewan komisari atau komite audit

Merupakan aspek terpenting dari semua pegawai yang kompeten dan dipercaya maka pengendalian lain boleh tidak ada dan laporan keuangan yang handal akan dihasilkan.

Partisipasi dewan komisaris dan komite audit sangat penting, hal ini untuk melihat sejauh mana manajemen telah menjalankan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan. Apakah Manajemen telah melakukan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan komite audit bertugas untuk mengaudit kinerja perusahaan terutama laporan keuangan yang dilakukan satu kali dalam setahun.

Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu dalam melakukan pengawasan sudah ada ditetapkan prosedurnya yaitu Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian intern, namun prosedur ini tidak dilakukan. Sedangkan peran serta komite audit hanya dilakukan oleh audit eksternal yang dilakukan satu kali dalam satu tahun.

### 4) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Meliputi sikap dari manajemen terhadap pengendalian. Manajemen dituntut untuk melakukan atau menjalankan pengendalian yang telah ditetapkan oleh direksi. Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang kubu pengendalian dilakukan untuk menghindari untuk meminimalisasi

kecurangan-kecurangan dan kesalahan dalam perusahaan. Misalnya pengendalian intern.

#### 5) Struktur organisasi

Merupakan satuan usaha untuk membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada.

Struktur organisasi dibuat untuk membatasi tugas dan tanggungjawab masing-masing manajemen, disamping itu juga untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawab manajemen agar tidak terjadi tugas rangkap.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu struktur organisasi secara teori bisa dikatakan sudah baik, namun secara prakteknya struktur organisasi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu kurang baik. Karena para manajemennya masih melakukan pelanggaran seperti, tidak membatasi tanggungjawab dan wewenang yang ada.

Sementara di dalam struktur organisasi sudah dijelaskan atau disebutkan tugas dan tanggungjawab masing-masing manajemen, tapi masih ada manajemen yang melakukan tugas yang bukan menjadi tanggungjawab mereka.

#### 6) Pemberian wewenang dan tanggungjawab

Otoritas dan tanggung jawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana operasional, jadwal dan anggaran. Salah satu hal yang sangat penting adalah peraturan yang menangani masalah seperti standar etika berperilaku,

praktek bisnis yang dapat dibenarkan, peraturan persyaratan, dan konflik kepentingan.

Pemberian wewenang dan tanggungjawab dapat dilakukan kepada manajemen yang mempunyai keahlian dan mengerti tentang permasalahan yang akan ditanganinya. Dalam hal ini pihak yang berwenang harus jeli dalam memilih manajemen yang akan diberi wewenang. Selain manajemen mempunyai keahlian dan mengerti manajemen tersebut juga harus bertanggungjawab atas tugas yang diembannya.

Pemberian wewenang dan tanggungjawab pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang kubu telah dilakukan tetapi tidak berjalan dengan efektif dan efisien, hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusianya dan tenaga kerjanya.

#### 7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Kebijakan dan praktik-praktik mengenai pengontrakan, pelatihan, pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkan ancaman, dan resiko. Para pegawai harus dipekerjakan dan dipromosikan berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi persyaratan pekerjaan mereka.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang kubu bagi karyawan yang dikontrak apabila mereka memiliki kinerja yang bagus maka karyawan tersebut akan diangkat menjadi karyawan tetap. Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan maka gaji mereka akan dinaikkan.

## **2. Penaksiran resiko**

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

Di dalam melakukan analisa kredit pada PD. BPR Rokan Hilir cabang Kubu, bagian analis kredit benar-benar memperhatikan calon debitur dan usaha yang di jalani oleh calao debitur. Terutama yang berhubungan dengan sikap dan kebiasaan calon debitur dan tempat usaha debitur. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan atau untuk menghindari resiko. Permohonan kredit tidak akan diterima apabila calon debitur mempunyai usaha dan tempat usahanya berada di daerah yang rawan bencana. Karena hal itu bisa menyebabkan usaha calon debitur tersebut gagal dan sudah bisa dipastikan debitur tidak akan dapat membayar tagihan kredit.

## **3. Aktivitas pengendalian**

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilakukan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan berikut ini:

- a. Review terhadap kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu, kredit yang macet pembayarannya oleh debitur ditagih oleh bagian kredit dan juga *debt collector*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tugas rangkap. Walaupun dalam struktur organisasi terdapat *debt collector* namun pada dasarnya dalam melakukan penagihan kredit yang macet pembayarannya oleh debitur dilakukan oleh *debt collector* dan bagian kredit. Ini jelas bahwa bagian kredit masih merangkap tugas. Hal tersebut memberi peluang untuk terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam perusahaan.

Struktur organisasi perusahaan dapat dikatakan baik dan berperan sebagai alat pengendalian apabila pemisahan fungsi yang digambarkan dalam struktur organisasi tersebut, diikuti dengan penempatan orang-orang yang tepat dan tidak adanya merangkap tugas antara satu fungsi dengan fungsi lainnya.

#### **4. Informasi dan komunikasi**

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

Informasi dan komunikasi sangat penting agar pengendalian yang dijalankan dapat efektif dan efisien. Dengan adanya informasi kita dapat mengetahui kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi. Dengan informasi tersebut maka terciptalah komunikasi. Melalui komunikasi seseorang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk itu dalam suatu perusahaan adanya komunikasi yang baik sangat mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut.

## 5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Pemantauan (*monitoring*) dalam pemberian kredit pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu terbagi atas dua bagian yaitu secara administrasi dan secara fisik dengan melakukan pemeriksaan. Pemantauan secara administrasi ialah pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan segala informasi atau data yang tersedia, baik berdasarkan catatan-catatan yang ada pada bank, informasi dari debitur itu sendiri maupun data atau informasi dari pihak ketiga misalnya akuntan atau media massa. Sedangkan pemantauan secara fisik yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melaksanakan kunjungan langsung ke lokasi usaha, jaminan atau tempat-tempat lain yang ada kaitannya dengan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

Setelah kredit dicairkan oleh debitur maka bagian kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan atas debitur tersebut dan melakukan pengecekan kebenaran akan penggunaan kredit yang telah diberikan secara berkala untuk memantau aktivitasnya. Jadi bagian kredit harus melakukan on the spot kepada debitur minimal per 3 bulan.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu, pemantauan secara berkala terhadap debitur setelah kredit dicairkan tidak dilakukan. Hal ini disebabkan oleh besarnya dana yang dikeluarkan oleh bank dan terbatasnya jumlah tenaga kerja untuk melakukan pemantauan tersebut.



Seharusnya pemantauan dilakukan, karena pemantauan secara berkala dapat mendeteksi gejala dini terjadinya kredit bermasalah dan merupakan tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur yang tidak terbatas hanya dari kinerja kredit tapi juga dari kinerja usaha. Sehingga jika ada masalah yang dihadapi oleh debitur yang akan mengakibatkan terganggunya pembayaran kredit, maka pihak bank akan dapat segera mengetahuinya dan dapat segera pula ditindak lanjuti. Seperti dengan mendiskusikan hal-hal yang dianggap bermasalah dan kemudian mencari jalan keluarnya.

Bila suatu bank telah melakukan pemantauan secara berkala dengan baik, berarti bank tersebut telah menjalankan sistem deteksi dini, dimana deteksi dini dilakukan untuk mengetahui indikasi-indikasi yang merupakan potensial merugi bagi bank. Jika pemantauan secara berkala tidak dilakukan maka apabila pihak debitur mengalami masalah terhadap usahanya, pihak bank akan terlambat mengetahuinya sehingga terjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian bagi bank.

## **6. Kredit Macet**

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan.

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu untuk memberikan keputusan apakah kredit layak diberikan atau tidak kepada calon debitur tersebut. Agar analis dapat memberikan analis secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia, maka analis kredit harus mendapatkan informasi dari berbagai sumber.

Sumber informasi tersebut bisa berasal dari debitur itu sendiri sebagai sumber utama informasi, kunjungan ke tempat usaha calon debitur, dan sumber informasi lain seperti dari referensi dagang , badan/organisasi industri ataupun dari catatan Bank Indonesia.

Ketentuan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang pemberian kredit adalah analisis 5 C yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu penilaian terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*Capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition*).

Pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu analisis terhadap capital/modal, calon debitur yang dilihat dari laporan keuangan, bukanlah hal mutlak yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya calon debitur yang kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut.

Tanpa melakukan analisis terhadap laporan keuangan calon debitur, maka informasi yang didapat analis tentang usaha calon debitur tidak maksimal, yang mengakibatkan analisis yang dilakukan analis tidak dapat melihat bagaimana kemampuan calon debitur untuk menghasilkan laba terhadap usahanya sehingga dapat melunasi kredit yang diberikan oleh bank. Ini mengakibatkan tingginya resiko bank untuk terjadinya kredit macet.

.Resiko terhadap kredit tentu disadari dan ada disetiap tarikan nafas bank, karena itu resiko-resiko tersebut harus diantisipasi agar pengaruh negatifnya terhadap perkreditan dapat diminimalkan. Tidak ada suatu kredit itu macet tiba-tiba bila tahap-tahap dalam proses pemberian kredit itu diikuti dengan baik.

Seharusnya analisis terhadap laporan keuangan usaha calon debitur adalah hal mutlak yang harus dilakukan, karena dengan laporan keuangan maka analis akan mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan usaha calon debitur, sehingga analis dapat melihat dan mempelajari seluk beluk kondisi keuangan termasuk asset dan juga posisi hutang calon debitur. Intinya dengan laporan keuangan usaha calon debitur maka analis dapat melihat dan menganalisis apakah penggunaan modal yang akan diberikan tersebut akan efektif, dalam arti calon debitur akan dapat menggunakan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan baik serta dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan diharapkan akan memberikan keuntungan bagi pihak bank dan juga bagi pihak calon debitur.

Jika calon debitur berpotensi namun belum dapat memberikan laporan keuangan, hendaknya petugas kredit memberikan bimbingan yang diperlukan sehingga calon debitur dapat membuat laporan keuangan. Karena selain sebagai pemberi kredit, bank juga berfungsi sebagai pengawas, pengatur dan melakukan pembinaan terhadap kredit yang diberikan.

Laporan keuangan yang utama adalah neraca dan laporan rugi laba. Petugas kredit dapat memberikan bimbingan kepada calon debitur untuk menyusun neraca dan laporan rugi laba secara sederhana, misalnya neraca terdiri dari asset yaitu kas, piutang, persediaan, peralatan usaha, tanah/bangunan, dan pasiva yaitu utang dan modal.

Gambar IV.I : Contoh bentuk neraca secara sederhana

PERUSAHAAN BAMBANG NERACA 31 DESEMBER 2005			
<b>Asset</b>		<b>Pasiva</b>	
Kas	Rp. xxx	Utang	Rp. xxx
Piutang	Rp. xxx	Modal	<u>Rp. xxx</u>
Prsediaan	Rp. xxx		
Tanah	Rp. xxx		
Gedung	<u>Rp. xxx</u>		
Jumlah Aktiva	<u>Rp. xxx</u>	Jumlah Pasiva	<u>Rp. xxx</u>

Gambar IV.2 : Contoh bentuk laporan laba/rugi perusahaan jasa secara sederhana

PERUSAHAAN JASA BAMBANG LAPORAN LABA-RUGI PER 31 DESEMBER 2005			
Pendapatan Jasa			Rp. xxx
Biaya-biaya Operasi:			
Biaya Gaji Pegawai	Rp. xxx		
Biaya air, Listrik dan Telpon	Rp. xxx		
Biaya Ansuransi	Rp. xxx		
Biaya lain-lain	<u>Rp. xxx</u>		
Jumlah Biaya			( <u>Rp. xxx</u> )
Laba/Rugi Sebelum Pajak			Rp. xxx
Pajak			( <u>Rp. xxx</u> )
Laba/Rugi Setelah Pajak			<u>Rp. xxx</u>

Gambar IV.3 : Contoh bentuk laporan laba/rugi perusahaan dagang secara sederhana

PERUSAHAAN DAGANG BAMBANG LAPORAN LABA-RUGI PER 31 DESEMBER 2005		
Penjualan	Rp. xxx	
Harga Pokok Penjualan	<u>(Rp. xxx)</u>	
Laba Kotor Penjualan		Rp. xxx
Biaya-biaya Operasi		
Biaya Penjualan	Rp. xxx	
Biaya Gaji Pegawai	Rp. xxx	
Biaya Asuransi	Rp. xxx	
Biaya lain-lain	<u>Rp. xxx</u>	
Jumlah Biaya		<u>(Rp. xxx)</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp. xxx
Pajak		<u>(Rp. xxx)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak		<u>Rp. xxx</u>

Aspek keuangan ini merupakan aspek yang sangat penting di dalam analisis permohonan kredit, meskipun aspek-aspek lainnya juga bisa merupakan aspek yang menentukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terhadap permohonan kredit yang diajukan calon debitur, untuk memberikan keputusan apakah kredit diterima atau ditolak maka dilakukan analisis kredit. Analisis kredit dilakukan dari berbagai aspek yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu aspek penting dalam melakukan analisis kredit adalah analisis terhadap laporan keuangan calon debitur.
2. Setelah kredit diberikan kepada debitur, maka PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur terutama yang berada di luar daerah.
3. Pada struktur organisasi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu sudah terdapat *debt collector*, namun tugas menagih kredit macet dilakukan oleh *debt collector* dan juga bagian kredit.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam pengajuan permohonan kredit pada kredit perdagangan umum, kredit jasa-jasa umum pada PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu, calon debitur harus menyertakan laporan keuangan usahanya. Jika calon debitur yang berpotensi namun tidak dapat membuat laporan keuangan, maka analisis kredit dapat memberikan bimbingan.

2. Seharusnya pemantauan secara berkala terhadap usaha calon debitur dilakukan oleh pihak PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu. Pemantauan itu berguna untuk mendeteksi gejala dini terjadinya indikasi-indikasi yang merupakan potensial kredit bermasalah, sehingga dapat segera ditanggulangi.
3. Pada struktur organisasi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu sebaiknya *Debt Collector* dan bagian kredit menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga tidak terjadi lagi rangkap tugas yang dilakukan oleh bagian kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

Agoes Sukrisno, 2000, *Auditing (pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi ke Dua, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Wibowo, 2002, *Pengantar Akuntansi 1*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta

Chalik, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua Belas, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dendawijaya lukman, 2002, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Djohan Warman 2000, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuan*, Penerbit PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Hadiwijaya dan Rivai Wirasasmita, 2001, *Analisis Kredit Dilengkapi Telaah Kasus*, Penerbit pioneer Jaya, Bandung.

Harahap Sofyan Syafri, 2004, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Irmayanto Juli, dkk 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kedua, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta



Jusuf Amir Abadi, 2003, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Penerbit salemba Empat, Jakarta.

Kasmir, 2002, *Manajemen Perkreditan*, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi Keenam, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Mulyono Teguh, 2001, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank komersial*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rivai Veithzal, dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhardjono, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Suyatno Thomas, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Utama, Jakarta.

Suyatno Thomas, Marala, Djuhaepa T, A. Abdullah, Aponno Y, Ananda, H.A. Chalik, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua Belas, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Supratmono Gatot, 2000, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.

Tunggal Amin Widjaja, 2000, *Coso-Based Auditing*, Harvarindo, Jakarta.

Tunggal Iman Sjahputra, Arif Djohan Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, 2003,  
*Peraturan Undang-Undang Perbankan di Indonesia*, Buku VI,  
Harvarindo, Jakarta.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN I</b>	<b>: Lampiran Neraca Per 31 Desember 2008</b>
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>: Lampiran Laba Rugi 31 Desember 2008</b>
<b>LAMPIRAN III</b>	<b>: Kolektibilitas Kredit Dan Total Kredit Yang diberikan Tahun 2005</b>
<b>LAMPIRAN IV</b>	<b>: Kolektibilitas Kredit Dan Total Kredit Yang diberikan Tahun 2006</b>
<b>LAMPIRAN V</b>	<b>: Kolektibilitas Kredit Dan Total Kredit Yang diberikan Tahun 2007</b>
<b>LAMPIRAN VI</b>	<b>: Kolektibilitas Kredit Dan Total Kredit Yang diberikan Tahun 2008</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 : Kredit Yang Disalurkan PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu periode 2005-2008 . . . . .	7
Tabel I.2 : Kolektibilitas kredit PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Periode 2005-2008 . . . . .	9

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar III.1      Struktur Organisasi .....	44
Gambar IV.1      Contoh Bentuk Neraca Sederhana .....	71
Gambar IV.2      Contoh Bentuk Laporan Laba/rugi Perusahaan Jasa Secara Sederhana .....	71
Gambar IV.3      Contoh Bentuk Laporan Laba/rugi Perusahaan Dagang Secara Sederhana .....	72

**Tabel I.1 : PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu**

**Kredit Yang Disalurkan Periode 2005 – 2008**

Dalam Jutaan Rupiah

No	Jenis Kredit	Tahun 2005 (Baki Debet)	%	Tahun 2006 (Baki Debet)	%	Tahun 2007 (Baki Debet)	%	Tahun 2008 (Baki Debet)	%
1	Kredit Pertanian	Rp 2.165	40,32	Rp 2.951	39,80	Rp 7.184	55,19	Rp 9.713	59,11
2	Kredit Perindustrian	Rp 3	0,06	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-
3	Kredit Perdagangan	Rp 1.861	34,66	Rp 2.222	29,97	Rp 2.720	20,90	Rp 2.785	16,95
4	Kredit Jasa-Jasa	Rp 179	3,33	Rp 895	12,07	Rp 1.290	9,91	Rp 1.308	7,96
5	Kredit Konsumtif	Rp 1.161	21,62	Rp 1.347	18,17	Rp 1.822	14,00	Rp 2.627	15,99
	Total	Rp 5.369		Rp 7.415		Rp 13.016		Rp 16.433	

Sumber: *PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu*

**Tabel I.2 : PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu  
Kolektibilitas Kredit Tahun 2005 - 2008**

Dalam Jutaan Rupiah

No	Kolektibilitas	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
1	Lancar	Rp 4.929	91,79	Rp 6.865	92,58	Rp 11.768	90,42	Rp 14.202	86,41
2	Kurang Lancar	Rp 118	2,20	Rp 193	2,60	Rp 787	6,05	Rp 1.437	8,74
3	Diragukan	Rp 314	5,85	Rp 281	3,79	Rp 158	1,21	Rp 303	1,84
4	Macet	Rp 9	0,17	Rp 76	1,02	Rp 302	2,32	Rp 493	3,00
	Total	Rp 5.370		Rp 7.415		Rp 13.015		Rp 16.435	

Sumber: *PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu*

**GAMBAR III.1 : STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR ROKAN HILIR  
KANTOR CABANG KUBU**

